

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Pengantar Redaksi .....	iii - v
Abstrak.....	i
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah) <i>oleh: Dina Martiany</i> .....	121- 136
Posisi Pekerja <i>Outsourcing</i> dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan <i>oleh: Dinar Wahyuni</i> .....	137 - 149
Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal <i>oleh: Herlina Astri</i> .....	151 - 162
“ <i>Malaria Center</i> ”: Sebuah Model Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit Malaria di Provinsi Maluku Utara <i>oleh: Rahmi Yuningsih</i> .....	163 - 175
Profesionalisasi Pengawas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah <i>oleh: Priadi Surya</i> .....	177 - 190
Hilangnya Hak Anak: Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia <i>oleh: Mohammad Teja</i> .....	191 - 208
Pendekatan Proses dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur) <i>oleh: Hubertus Ubur</i> .....	209 - 224
<i>Book Review</i> Mengukur Kesejahteraan <i>oleh: Hana Nika Rustia</i> .....	225– 232
Biodata Penulis Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi penerbitan kali ini, Jurnal *Aspirasi* masih konsisten untuk menyajikan masalah-masalah sosial dan memberikan informasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terutama mengenai isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Diharapkan pula bisa menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan terhadap kepentingan dan kemakmuran bangsa.

Tulisan pertama ditulis oleh Dina Martiany dengan judul “Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender, Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah.” Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kesetaraan Gender (KG), yang harus dimulai dengan Analisis Gender. Efektifitas PUG sebagai strategi KG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan. Pengaturan mengenai PUG dianggap perlu dirumuskan dalam suatu bagian pada undang-undang yang komprehensif.

Selanjutnya Dinar Wahyuni mencoba mendeskripsikan Posisi Pekerja *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Outsourcing* menjadi sah pascakeluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja *outsourcing* dalam Undang-Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja *outsourcing* tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja. Dari dimensi serikat pekerja, praktik *outsourcing* akan semakin meminimalisir fungsi dan peran serikat dalam perusahaan. Dari dimensi konflik industrial dan penyelesaiannya, apabila terjadi konflik, maka pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja, karena hubungan hukum yang terjadi antara pekerja *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa pekerja.

Herlina Astri mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, dan semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi adalah kondisi yang memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut yang dipaparkan pada tulisannya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal.” Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.

Kajian keempat dari Rahmi Yuningsih merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3% pada tahun 2003 menjadi 38% pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan *Malaria Center* yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Malaria Center* dikembangkan. Konsep semacam *Malaria Center* kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya. Selanjutnya Priadi Surya dari Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan mengkaji profesionalitas pengawas pendidikan dalam konteks otonomi daerah, dimana pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional.

Tulisan keenam dari Mohammad Teja mengkaji persoalan konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak, konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi.

Tulisan dari Hubertus Ubur bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?.” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) *Sustainability* sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia.

Selain tujuh artikel di atas, Jurnal Aspirasi Volume 2 Nomor 2 ini ditutup dengan *review* dari sebuah buku oleh Hana Nika Rustia dengan judul “Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?” yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul dan diterjemahkan Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur. Buku setebal 180 halaman ini terbit pada tahun 2011. Kekuatan utama buku ini tentu terdapat pada penulisnya yang merupakan ekonom-ekonom nomor satu dunia dengan berbagai penghargaan yang mereka terima. Pemahaman ekonomi makro mereka yang sangat mendalam akan membuat mata pembaca terbuka tentang bagaimana PDB selama ini sering disalahgunakan oleh segelintir penguasa dalam pengambilan kebijakan dan juga pernyataan-pernyataan politik mereka.

Redaksi Jurnal Aspirasi berharap semua tulisan-tulisan dapat bermanfaat sebagai masukan, inspirasi, dan menambah wawasan Anggota Dewan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Redaksi juga berharap pengembangan kajian yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum dan penelitian selanjutnya.

Jakarta, Desember 2011

Redaksi

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

**Dina Martiany**

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah)

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 121-136**

***Abstract***

*Implementation of Gender Mainstreaming is a strategy to achieve Gender Equality, started with Gender Analysis. Its effectiveness as a strategy influenced by significant factors. This article aims to analyse how the implementation of Ministry of Internal Affairs Regulation Number 15 Year 2008 and the obstacles occurred in Province of Central of Java and North of Sumatera, also how to increase Gender Mainstreaming effectiveness and strictly reach the goals. The Method of data analysis applied a descriptive qualitative approach. Based on data collection conducted in both local areas, founded that Gender Mainstreaming is uncommitted coverage yet. Implementation of Ministry of Internal Affairs Regulation Number 15 Year 2008 about General Instruction of Implementation of Gender Mainstreaming in the Local Area should be improved. Therefore, regulation of gender mainstreaming urgently needed to formulated in a part of comprehensive act.*

*Keywords: Gender equality, gender mainstreaming, implementation, strategy, gender analysis.*

**Abstrak**

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kesetaraan Gender (KG), yang harus dimulai dengan Analisis Gender. Efektifitas PUG sebagai strategi KG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi dan hambatan Permendagri No. 15 tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah, serta bagaimana PUG menjadi strategi pencapaian KG yang efektif dan tepat sasaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan. Pengaturan mengenai PUG dianggap perlu dirumuskan dalam suatu bagian pada undang-undang yang komprehensif.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, pengarusutamaan gender (PUG), implementasi, strategi, analisis gender.

## ASPIRASI JURNAL STUDI MASALAH-MASALAH SOSIAL

Vol. 2 No. 2 Desember 2011

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

### **Dinar Wahyuni**

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*

Posisi Pekerja *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 137-149**

### ***Abstract***

*Outsourcing is legitimate after Act No. 13 of 2003 regarding employment was passed. This paper tries to analyze the position of outsourced workers in the act from three dimension i.e worker relations, worker unions, industrial conflict and its resolution. From the worker relations dimension, workers' status is unclear because the outsourcing agreement made was between the employee and the outsourcing companies. There has been inconsistencies in application of working agreement, and this will reduce workers' rights. From the the trade unions dimensions, the practice of outsourcing will further minimize the function and role of unions within the company. From the industrial conflict dimensions and its resolution, if a conflict occur, the authorities who resolve the dispute is the outsourcing company. It happens because the agreement made is between the worker and the outsourcing company.*

*Keywords: Outsourcing, industrial relations, worker*

### **Abstrak**

*Outsourcing* menjadi sah pascakeluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja *outsourcing* dalam Undang-Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja *outsourcing* tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja. Dari dimensi serikat pekerja, praktek *outsourcing* akan semakin meminimalisir fungsi dan peran serikat dalam perusahaan. Dari dimensi konflik industrial dan penyelesaiannya, apabila terjadi konflik, maka pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja, karena hubungan hukum yang terjadi antara pekerja *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa pekerja.

Kata Kunci: *Outsourcing*, hubungan industrial, pekerja

## ASPIRASI JURNAL STUDI MASALAH-MASALAH SOSIAL

Vol. 2 No. 2 Desember 2011

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

**Herlina Astri**

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*

Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 151 - 162**

### ***Abstract***

*The difficult to get job field, treatment inexistence same at law area and amount of rights infringement that support society, more widen social difference that. That condition trigger happening of good conflict between each other in society, also with another society group. this writing aim give description hit manners that can be done in local wisdom reinforcement so that can be used for social conflicts completion that. This study uses literature study and concepts interpretation related to comprehension about social conflict and local wisdom.*

*Keywords: Social conflict, conflict completion, local wisdom reinforcement*

### **Abstrak**

Sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.

Kata kunci: Konflik sosial, penyelesaian konflik, penguatan kearifan lokal



## ASPIRASI JURNAL STUDI MASALAH-MASALAH SOSIAL

Vol. 2 No. 2 Desember 2011

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

**Rahmi Yuningsih**

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*

*“Malaria Center”*: Sebuah Model Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit Malaria di Provinsi Maluku Utara

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 163 - 175**

### *Abstract*

*North Moluccas is a malaria endemic area. The clinical prevalence decline from 81,3% in to into 38% in 2010. Such a sharp decline is considered as a great success of the Malaria Center development initiative that has been in operation since 2003. The purpose of this research is to know how the Malaria Center is developed in North Moluccas. The research was conducted using the Focus Group Discussion approach that was implemented involving the stakeholders in early April 2011. The result shows that the Malaria Center development initiative is indeed the key for the success in reducing the malaria prevalence in 2003-2009. Its strength point is the strategy in advocacy, partnership and empowerment that are catalytically created a malaria control system with a complete and sufficient size of elements include human resource, budget, logistic, laboratory as well as recording and reporting. This initiative may be replicated, perhaps with some adaptations, in other malaria endemic areas.*  
*Keywords: Malaria disease, malaria center, North Moluccas*

### **Abstrak**

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3% pada tahun 2003 menjadi 38% pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan *Malaria Center* yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Malaria Center* dikembangkan. Penelitian dilakukan dengan mengadakan *Focus Group Discussion* bersama pemangku kepentingan terkait pada awal April 2011. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan *Malaria Center* merupakan kunci keberhasilan Provinsi Maluku Utara dalam menurunkan angka kejadian malaria dalam periode 2003-2009. Kekuatan utamanya adalah dalam strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang secara sinergis membangun suatu sistem pengendalian malaria dengan komponen yang lengkap dan memadai, meliputi sumber daya manusia, anggaran, logistik, laboratorium serta pencatatan dan pelaporan. Konsep semacam *Malaria Center* kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.

Kata Kunci: Penyakit malaria, malaria center, Maluku Utara

## ASPIRASI JURNAL STUDI MASALAH-MASALAH SOSIAL

Vol. 2 No. 2 Desember 2011

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

**Priadi Surya**

*Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Negeri Yogyakarta*

Profesionalisasi Pengawas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 177 - 190**

### ***Abstract***

*Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC).*

*Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy*

### **Abstrak**

Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP).

Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah

<b>ASPIRASI JURNAL STUDI MASALAH-MASALAH SOSIAL</b>	
<b>Vol. 2 No. 2 Desember 2011</b>	<b>ISSN: 286-6305</b>
Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya	
<p><b>Mohammad Teja</b>  <i>Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI</i></p> <p>Hilangnya Hak Anak: Studi Kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia</p> <p><b>Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011</b>  <b>Halaman 191 - 208</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abstracts</b></p> <p><i>Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government's handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately.</i></p> <p><i>Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi.</p> <p>Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan</p>	

Kata Kunci yang dicantumkan adalah isi abstrak. Lembar abstrak ini boleh di perbanyak tanpa ijin dan biaya

**Hubertus Ubur**

*Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta*

Pendekatan Proses dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan  
(Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)

**Jurnal APSIRASI Vol. 2 No. 2 Desember 2011**

**Halaman 209 - 224**

### ***Abstracts***

*This paper aims to address the subject matter, "Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?." In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped "project" alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a 'creature is not at all be a' but 'a creature that continues to be'.*

*Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, "Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?" Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) *Sustainability* sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk "proyek" saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan 'mahluk bukan sekali jadi' tetapi 'mahluk yang terus-menerus menjadi'.

Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan